

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113. Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab yang besar untuk aparatur pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan terdiri dari : anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran (LRA). Sedangkan pihak-pihak yang wajib menggunakan informasi keuangan desa diantaranya : masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Laporan keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan bagi publik untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pemerintah daerah. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika tidak ada permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah desa harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, apabila tidak terlaksana dengan baik maka akibatnya sering terjadi kasus seperti : korupsi,

penyelewengan keuangan desa, pemborosan anggaran dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang buruk. Salah satunya adalah lemahnya sistem pengendalian internal seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan staf keuangan, kurangnya teknologi informasi dan penerapan standar yang kurang (Mahmudi, 2010). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki 4 karakteristik dasar yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumber daya manusia(Wahyono,2004).

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan bidangnya. Sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan(Roshanti,dkk, 2014). Kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penentu tingkat akuntabilitas. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bisa dilihat dari hasil kerja yang dihasilkannya, dan apa yang dikerjakan olehnya.

Kabupaten Ponorogo memiliki 21 kecamatan, 26 kelurahan dan 281 desa.Penelitian ini memilih studi di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Sukorejo memiliki 18 desa yaitu Desa Kalimalang, Desa Sragi, Desa Morosari, Desa Karanglo Lor, Desa Gandu Kepuh, Desa Nambangrejo, Desa Lengkong, Desa Golan, Desa Sukorejo, Desa

Bangunrejo, Desa Sidorejo, Desa Nampan, Desa Gelang Lor, Desa Serangan, Desa Prajegan, Desa Kedung Banteng, Desa Gegeran dan Desa Kranggan. Terdapat beberapa desa di Kecamatan Sukorejo yang pelaporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan misalnya terkait ketepatan waktu penyelesaian pelaporan dana desa, ketidaksesuaian format yang ditetapkan karena belum sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas SDM rata-rata belum memadai atau belum memahami pengelolaan keuangan, karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Hal ini menjadi masalah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo perihal laporan keuangan yang belum maksimal karena tingkat pendidikan pada perangkat desa yang masih minim. Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Sukorejo pada tahun 2023 perangkat desa dengan pendidikan SMA berjumlah 174 sedangkan untuk pendidikan S1 berjumlah 21 (https://id.wikipedia.org/wiki/Sukorejo,_Ponorogo).

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dapat di pertanggung jawabkan SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi ataupun pendidikan keuangan (Irfan, 2022). Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Nurillah, 2014). Kurangnya pengalaman, pengetahuan, bimbingan, pelatihan dan juga usia sehingga berdampak juga pada rendahnya perencanaan pembangunan desa yang ditandai dengan keterbatasan kemampuan di dalam

penyusunan atau pembuatan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Penerapan standar akuntansi pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Standar akuntansi pemerintah diberlakukan untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit, di pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah sehingga sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel (Nordiawaan, 2010). Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis (Masta : 2019).

Menurut hasil penelitian (Nabila dkk, 2019) bahwa kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Menurut (Mardiyatun, 2020) bahwa Kompetensi SDM, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan desa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan APBDes.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan desa yang ada di kecamatan sukorejo

yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah dikarenakan tingkat pendidikan aparatur desa yang bervariasi yang mengakibatkan pemahaman terhadap pengelolaan laporan keuangan masih kurang sehingga berdampak pada kekeliruan pelaporan yang dibuat dan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan. Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut kualitas laporan keuangan desa dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Sekecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil dalam penelitian yaitu :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan desa Sekecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap laporan keuangan desa Sekecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan desa Sekecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan desa Sekecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi desa Sekecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM dan penerapan standar akuntansi desa Sekecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Manfaat penelitian

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau referensi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dan umumnya bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengaruh kompetensi SDM dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Laporan keuangan desa Sekecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak organisasi, pemerintah atau pun pihak lainnya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan desa berdasarkan penerapan standar akuntansi desa.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengimplementasian pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan untuk menambah wawasan dan meningkatkan daya pikir ilmiah.

4. Bagi peneliti yang akan mendatang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/literature bagi peneliti yang akan datang di ruang lingkup yang sama.

